

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ISLAM
DI KABUPATEN CIREBON**

Agus Rianto

Dosen Tetap Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jl.Tuparev No.70 Cirebon, Telp/Fax: 0231-209806

Email: agusrian1976@gmail.com

Abstrak

Di Kabupaten Cirebon, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan politik untuk mencapai tujuan demokratisasi di tingkat daerah yaitu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 65 Tahun 2008, berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam di Kabupaten Cirebon. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam oleh di Kabupaten Cirebon.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada lembar wawancara yang telah disusun, pengamatan dan studi pustaka. Pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive random sampling*. Responden yang diambil adalah berasal dari unsur Badan Kesbanglinmas sebanyak 4 (empat) orang, Partai Politik Islam sebanyak 12 yang diambil dari 3 orang pengurus partai politik tingkat kabupaten dari empat partai islam (dua belas) orang. Jadi, jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 16 (enam belas orang).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Badan Kesbanglinmas yang rinci berdasarkan aspek rumusan kebijakan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, aspek dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengembangan demokratisasi adalah fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang terlaksana dengan baik. Dalam aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan demokratisasi sudah cukup bermakna. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik, diskusi politik, pembekalan pengurus parpol serta sosialisasi peraturan perundangan tentang partai politik sudah dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam. Faktor yang berpengaruh dalam peranan Badan kesbanglinmas adalah, Pertama; faktor pendukung yang meliputi tersedianya kebijakan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, keterlibatan partai politik islam yang selalu mendukung program kerja Badan Kesbanglinmas, serta ketersediaan SDM Badan Kesbanglinmas yang cukup. Kedua; faktor penghambat meliputi alokasi anggaran yang belum menunjang kegiatan serta kurangnya pelatihan bagi pegawai Badan Kesbanglinmas

Kata Kunci : Peranan, Badan Kesbanglinmas, Pelembagaan Partai Politik

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu kondisi politik pasca Reformasi menjadikan masyarakat dihadapkan dengan sistem baru yang menuntut masyarakat untuk lebih terlibat secara pro-aktif didalamnya. Dalam penerapannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga dalam

mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan, hal inilah yang kita inginkan dalam proses pembangunan politik.

Dalam konteks negara Indonesia, yang notabenehnya warga negaranya mayoritas Islam ini, dinamika politik yang ada, khususnya politik Islam memiliki pasang

surut dalam percaturan perpolitikan. Indonesia adalah sebuah negara modern yang dimana di dalamnya dalam proses pemerintahannya menggunakan sistem partai dalam menentukan pemerintahannya seperti negara-negara modern lainnya sehingga politik Islam masuk dalam sistem partai.

Dalam proses sejarahnya, partai politik Islam menuai dinamika perpolitikan. Hal ini tidak terlepas pluralnya penduduk Indonesia yang bukan hanya Islam saja di dalamnya. Dinamika tersebut dapat terlihat pada *track record* keikutsertaan partai politik Islam dalam sejarah panjang pemilihan umum di Indonesia.

Perubahan-perubahan dalam dinamika perpolitikan Indonesia khususnya yang terjadi pada partai politik Islam dari masa ke masa, semakin menunjukkan beragamnya pemahaman Islam dan politik partai. Munculnya partai-partai Islam dalam era reformasi sebagai kendaraan politik menuju kekuasaan adalah sebuah dinamika yang menarik mengingat pada era ini warga Indonesia semakin cerdas dan pragmatis dalam menentukan masa depan mereka.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pembinaan politik telah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk dapat melaksanakan proses pembinaan politik. Secara spesifik di Kabupaten Cirebon, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan politik untuk mencapai tujuan demokratisasi di tingkat daerah yaitu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 65 Tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan kiprah Badan Kesbanglinmas Kabupaten Cirebon dalam pembinaan politik dengan judul : "**Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam di Kabupaten Cirebon**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam di Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas dalam Pelembagaan Partai Politik Islam oleh di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas terhadap Pelembagaan Partai Politik Islam oleh di Kabupaten Cirebon.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Tinjauan Pustaka

A. Tugas dan Fungsi Badan Kesbanglinmas Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan Susunan Organisasi yang ada di Badan Kesbanglinmas, maka demokratisasi berada pada bidang pengembangan demokratisasi yang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang. Bidang pengembangan demokratisasi mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengembangan demokratisasi sebagaimana dituangkan dalam pasal 10 ayat (2) Perbup Cirebon No. 65 Tahun 2008.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Demokratisasi mempunyai fungsi sebagaimana ayat (3):

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan demokratisasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

- di bidang pengembangan demokratisasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan demokratisasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai unsur pelaksana bidang pengembangan demokratisasi maka terdapat 2 subbidang yang berada di bawahnya yaitu Subbidang Pengembangan Etika, Pendidikan dan Partisipasi Politik dan subbidang Fasilitasi Organisasi/ Lembaga Politik dan Kemasyarakatan. Dalam Perbup Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2), Subbidang Pengembangan Etika, Pendidikan dan Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan etika, pendidikan dan partisipasi politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan Etika, Pendidikan dan Partisipasi Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan etika, pendidikan dan partisipasi politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan etika, pendidikan dan partisipasi politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan etika, pendidikan dan partisipasi politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Pengembangan Demokratisasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Perbup Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 Pasal 12 ayat (2), Subbidang Fasilitasi Organisasi/Lembaga Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi organisasi/lembaga politik dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Fasilitasi Organisasi/Lembaga Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi organisasi/lembaga politik dan kemasyarakatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi organisasi/lembaga politik dan kemasyarakatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi organisasi/lembaga politik dan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Demokratisasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Institusionalisasi Partai Politik

Menurut Huntington (1968:12), pelembagaan atau institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Samuel P. Huntington pernah mengutarakan bahwa "partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik."

Secara umum, pelembagaan partai politik dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika organisasi langsung telah mendapatkan "*value* (nilai) dan *stability* (stabilitas)". Jika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik dapat dikatakan terlembagakan dengan baik.

Dalam menjamin kemampuan memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi

partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.

Pelembagaan partai politik menurut Guillermo O'Donnell melibatkan dua aspek penting, yaitu *value infusion* (nilai pemasukkan) dan *behavioral routinization* (rutinitas perilaku). *Value infusion* merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik. Sementara itu, *behavioral routinization* terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus partai, maupun masyarakat luas lainnya.

Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan kelembagaan partai politik pada masa transisional, setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry Diamond dan Richard Gunther dalam bukunya *Political Parties and Democracy*. Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu :

1. Keutuhan Internal

Suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (*faksionalisme internal*). Adanya dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik ke depan. Karena itu, ada beberapa catatan penting guna menumbuhkan keutuhan internal partai; (1) mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai,

(2) meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai, dan (3) memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian.

2. Ketangguhan Organisasi

Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber dayanya ke level-level yang lebih rendah daripada di tingkat Pusat/Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik di semua level administrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya (manusia, finansial, serta metode) dapat bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Identitas Politik Partai

Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya untuk mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang kuat. Dukungan suara pada partai politik memerlukan strategi yang jitu dan konkret. Dan, salah satu jalan yang paling jitu dalam meraup dukungan pemilih adalah melalui mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan dukungan dari para votels, partai politik harus mengorganisasi sumber daya-sumber daya internal partai. Untuk tujuan itu, partai politik harus memiliki gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih.

Pelembagaan partai merujuk pada empat dimensi sistem institusionalisasi partai yang dikembangkan Mainwaring dan Scully (1995): Pertama, stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka *volatility* dalam pemilu. Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideologi yang mengikat. Akar partai dalam

masyarakat ditentukan oleh program dan ideologi yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan ideologi antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka melihat partai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi. Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya.

Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan

dengan peranan kesbanglinmas terhadap pelembagaan partai politik Islam.

B. Operasional Variabel

1. Konsep Peranan Badan Kesbanglinmas.

Di dalam penelitian ini, peranan Badan Kesbanglinmas didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesbanglinmas khususnya bidang pengembangan demokratisasi. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam; memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan.

2. Konsep Pelembagaan Partai Politik Islam

Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai politik islam untuk melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Peranan Badan Kesbanglinmas	Tugas dan Fungsi Badan Kesbanglinmas	1. perumusan kebijakan teknis 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas
2	Pelembagaan Partai Politik Islam	Perangkat Pelembagaan Partai Politik	1. Keutuhan Internal 2. Ketangguhan Organisasi 3. Identitas Politik Partai

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Orang (informan),
2. Peristiwa/situasi,
3. Dokumen,

Berdasarkan sumber data diatas, maka proses dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*)
2. Pengamatan (*observe*);
3. Dokumentasi (*documentation*)

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur Badan Kesbanglinmas berkaitan dengan

perannya dan partai politik Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan "*purposive sample*" yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompoten terhadap masalah yang dihadapi

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Badan Kesbanglinmas sebanyak 4 (empat) orang,
- b. Partai Politik Islam sebanyak 12 yang diambil dari 3 orang pengurus partai

politik tingkat kabupaten dari empat partai islam (dua belas) orang.

Jadi, jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 16 (enam belas orang).

E. Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) meliputi tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi data (*reduction data*),.
2. Sajian data (*data display*),
3. Penarikan kesimpulan (*conglution drawing*),

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelebagaan Partai Politik Islam

Keterkaitan peran Badan Kesbanglinmas dalam proses pelebagaan partai politik islam adalah dengan melihat dari aspek dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dalam pengembangan sumber daya internal partai politik. Pengembangan sumber daya (manusia dan finansial) melalui penguatan ketangguhan organisasi kepada pengurus partai politik misalnya melalui bintek bendahara partai politik yang mengatur tentang penggunaan keuangan bagi partai politik. Salah satu bentuk penggunaan berdasarkan petunjuk teknis adalah salah satu kegiatannya untuk membiayai pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan partai politik penerima bantuan harus mengikuti pada pedoman dan tata cara penggunaan, penyaluran dan pelaporan bantuan keuangan partai politik. Dengan fasiltasi bantuan keuangan bagi parpol, maka partai politik dapat mempertanggungjawabkan keuangan partai secara baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelebagaan partai politik adalah memberikan fasiltasi dalam penguatan kelembagaan partai politik dengan peningkatan sumberdaya manusia partai politik dalam pengembangan pendidikan politiknya yang dilakukan secara kontinyu.

Selain itu pemberian bantuan keuangan bagi partai politik juga sedikit banyak menguatkan ketangguhan partai politik karena sebagian besar dananya yaitu 60% dari dana bantuan adalah untuk pendidikan politik termasuk pengkaderan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini diakui dari hasil wawancara kepada beberapa pengurus partai politik islam yang menyimpulkan bahwa kegiatan fasiltasi bintek bantuan keuangan bagi bendahara partai politik setidaknya memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyusun dan melaporkan keuangan.

Peranan Badan Kesbanglinmas terkait dengan identitas partai politik terdapat rumusan kebijakan teknis terhadap upaya peningkatan institusionalisasi partai politik yang dituangkan dalam rencana dan program kerja yang diturunkan dari Rencana Strategis. Identitas partai politik dapat terbangun dari hasil validasi negara dalam hal ini Badan Kesbanglinmas yang memfasilitasi verifikasi Partai Politik dalam rangka pengembangan demokratisasi, diskusi politik, pembekalan pengurus parpol serta sosialisasi peraturan perundangan tentang partai politik sudah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan seminar, sosialisasi dan talkshow menurut pengurus parpol yang berhasil diwawancarai memberikan manfaat dalam menunjukkan eksistensi partai politik kepada masyarakat. Keikutsertaan parpol dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesbanglinmas menguatkan bahwa pendidikan politik yang menjadi tugas Badan Kesbanglinmas dapat berjalan efektif.

Keutuhan internal partai politik mensyaratkan suatu sistem demokratisasi internal yang menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Demokratisasi dengan dialog terbuka hanya dapat dilaksanakan dengan pendidikan politik yang berhasil. Oleh karena peranan Badan Kesbanglinmas dalam agenda pendidikan politik yang dilaksanakan setiap tahun sudah dilaksanakan sebagaimana terjadwal sesuai dengan pernyataan pengurus partai islam yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Cirebon

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Badan Kesbanglinmas dalam Pelembagaan Partai Politik Islam

a. Faktor Pendukung

- 1) Ketersediaan kebijakan teknis yang mendukung kegiatan Badan Kesbanglinmas dalam melaksanakan peranannya di bidang pengembangan demokratisasi khususnya pelembagaan partai politik. Mulai dari Undang-undang hingga peraturan Bupati telah mengatur secara rinci tugas, wewenang dan fungsi Badan Kesbanglinmas dalam menjalankan perannya sebagai Satuan kerja perangkat daerah.
- 2) Partisipasi Partai Politik khususnya Parpol Islam dalam keikutsertaannya terhadap rencana dan program kerja Badan Kesbanglinmas cukup baik, hal ini dapat dilihat dari selalu terlibatnya kader-kader parpol islam dalam kegiatan pembinaan politik
- 3) Tercukupinya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas di Badan Kesbanglinmas. Sebagai Badan yang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dibutuhkan aparat pemerintah (PNS) yang memiliki SDM yang berkualitas.

b. Faktor penghambat

- 1) Alokasi anggaran yang belum menunjang kegiatan. Untuk pelaksanaan pendidikan politik yang berkelanjutan diperlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat mencakup pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Kesbanglinmas harus melaksanakan kegiatan dengan dana yang minim. Sehingga kecenderungannya, kegiatan terlaksana dengan seadanya.
- 2) Kurangnya Pelatihan bagi Pegawai Badan Kesbanglinmas. Untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kesbangpolimas, dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan politik. Hal ini

dimaksudkan agar pegawai Badan Kesbanglinmas dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pendidikan politik terlebih dahulu, sebelum mentransfernya kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon

Penutup

A. Kesimpulan

1. Peranan Badan Kesbanglinmas terhadap pelembagaan partai politik islam di Kabupaten Cirebon

Peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Badan Kesbanglinmas yang rinci berdasarkan aspek rumusan kebijakan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, aspek dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengembangan demokratisasi adalah fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang terlaksana dengan baik. Dalam aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan demokratisasi sudah cukup bermakna. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik, diskusi politik, pembekalan pengurus parpol serta sosialisasi peraturan perundangan tentang partai politik sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam

- a. Faktor pendukung yang meliputi tersedianya kebijakan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, keterlibatan partai politik islam yang selalu mendukung program kerja Badan Kesbanglinmas, serta ketersediaan SDM Badan Kesbanglinmas yang cukup
- b. Faktor penghambat meliputi alokasi anggaran yang belum menunjang kegiatan serta kurangnya pelatihan bagi pegawai Badan Kesbanglinmas

B. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis membuat catatan saran sebagai berikut, bahwa:

1. Peranan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbanglinmas Kabupaten Cirebon sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai selama ini, dan dimasa yang akan datang. Khususnya mengenai peranannya pelembagaan partai politik
2. Mengupayakan peningkatan dukungan anggaran untuk mendukung aktivitas pelembagaan partai politik
3. Badan Kesbanglinmas mengoptimalkan langkah-langkah pembinaan berkelanjutan terhadap partai politik baik yang mendapat kursi di DPRD maupun yang tidak.
4. Perlunya segera menyiapkan langkah-langkah sosialisasi dan pembinaan sebagai tindak lanjut perkembangan kehidupan politik secara nasional yang akan berimbas pada kehidupan politik di daerah

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Afrilia, 2010. *Memajukan Demokrasi dalam Pembangunan Politik Indonesia. Tersedia*
http://uvacreamy.blogspot.com/2010/11/memajukan-demokrasi-dalam-pembangunan_04.html
- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hermawan, Eman. 2001. *Politik Membela Yang Benar*. Yayasan KLIK: Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P dan Juan M. nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lincoln, Yvonna S. dan Guba, Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Baverrly Hills: Sage Publictaions.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta: Jakarta.

- Mardialis, 2015. repository.uin-suska.ac.id/280/3/BAB%20II(2)
- Moeleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Press
- Suharto, Edi.2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS).
- Suryadi, Budu. 2007. *Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Syarbaini Syahril, A. Rahman, Monang Djihado. 2002. *Sosiologi dan Politik Ghalia Indonesia*,
- Usman Abdul Muis Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000
- Wiranto, F.A. dkk. 1997. *Perpustakaan menjawab tantangan jaman*. Semarang : Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Instruksi Presiden Nomor. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat